

MANUAL INDIKATOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024

Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
Tujuan :  Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana			
Sasaran :  Tercapainya penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai standart	Presentase penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai respons time			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</b>	Mengukur sejauh mana kebutuhan penunjang operasional pemerintahan telah dipenuhi atau terfasilitasi dengan baik. Kebutuhan penunjang pemerintahan mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, anggaran, fasilitas fisik, dan lainnya.	$\left( \frac{\text{Total kebutuhan yang terfasilitasi}}{\text{Total kebutuhan}} \right) \times 100 \%$	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</b>	Mengukur keberhasilan dalam menyelesaikan dan menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumen perencanaan mencakup rencana strategis, rencana operasional, atau dokumen lain yang menguraikan visi, misi, tujuan, dan langkah-langkah untuk mencapai hasil target pencapaian tujuan dan efektivitas program	$\left( \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu}}{\text{Total jumlah dokumen yang harus disusun}} \right) \times 100 \%$	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun yang berkaitan dengan tusi perangkat daerah seperti, Dokumen Analisis Risiko Bencana, Perumusan Rencana Tanggap Darurat Bencana dan Kebakaran, Penyusunan Rencana Pemulihan Pasca-Bencana, Pengembangan Sistem Informasi Bencana, Penguatan Kapasitas dan Pelatihan serta Partisipasi Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan terkait dengan perangkat daerah}}$	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Digunakan untuk mengukur sejauh mana SKPD atau unit organisasi dalam pemerintahan daerah telah menyusun dan menyajikan laporan mengenai capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja mereka. Laporan ini umumnya mencakup informasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD = Jumlah laporan yang disusun oleh SKPD dan mencakup capaian serta ikhtisar realisasi kinerja	

Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
		tentang pencapaian tujuan, target, dan hasil kinerja SKPD		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang telah disusun oleh BPBD atau unit organisasi terkait dengan penanggulangan bencana di daerah. Laporan ini mencakup analisis terhadap berbagai aspek, seperti respons terhadap bencana, efektivitas program mitigasi bencana, koordinasi dengan pihak terkait, dan kemajuan dalam mencapai tujuan penanggulangan bencana.	$\frac{\text{Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja}}{\text{Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun}}$	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	Jumlah laporan keuangan yang berhasil disusun dan diajukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.	$\left( \frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu}}{\text{Total jumlah laporan keuangan yang harus disusun}} \right) \times 100 \%$	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji dan tunjangan dari entitas atau instansi pemerintah. Gaji dan tunjangan ASN mencakup berbagai komponen, termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya.	$\frac{\text{Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN}}{\text{Jumlah pegawai ASN yang menerima gaji dan tunjangan}}$	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen terkait koordinasi dan pelaksanaan akuntansi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit organisasi terkait. Dokumen ini dapat mencakup koordinasi antar SKPD, petunjuk pelaksanaan, atau pedoman teknis yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD}}{\text{Jumlah dokumen terkait koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Yang disusun oleh SKPD}}$	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan jumlah laporan koordinasi yang telah disusun oleh SKPD pada periode waktu tertentu (bulanan, triwulanan, atau semesteran).	$\frac{\text{Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD}}{\text{Jumlah laporan yang disusun oleh SKPD pada periode tertentu}}$	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</b>	Prosentase seberapa banyak laporan yang berkaitan dengan barang milik daerah dapat tersusun dan diajukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Laporan barang milik daerah melibatkan informasi tentang inventarisasi, pemeliharaan, dan	$\left( \frac{\text{Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang Tersusun Tepat Waktu}}{\text{Total jumlah laporan barang milik daerah yang harus disusun}} \right) \times 100 \%$	

Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
		penggunaan barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mengukur seberapa banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit organisasi pemerintah yang menyusun dan melaporkan rekonsiliasi serta laporan barang milik daerah. Laporan ini berkaitan dengan inventarisasi, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah pada tingkat SKPD.	$\frac{\text{Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD}}{\text{Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun oleh SKPD atau unit organisasi terkait}}$	
<b>Administrasi Umum</b> <b>Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>	Prosentase sejauh mana layanan administrasi perkantoran telah terpenuhi atau dilaksanakan dengan baik. Layanan administrasi perkantoran mencakup berbagai kegiatan seperti manajemen dokumen, penyediaan perlengkapan kantor, pelayanan kepada masyarakat, dan sebagainya.	$\left( \frac{\text{Jumlah layanan administrasi terpenuhi}}{\text{Total jumlah laporan layanan administrasi yang dibutuhkan}} \right) \times 100 \%$	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket atau unit komponen instalasi listrik dan penerangan yang telah dipasang atau disediakan di dalam sebuah bangunan kantor. Komponen instalasi listrik dan penerangan ini mencakup berbagai perangkat seperti sakelar, stop kontak, lampu, dan sebagainya.	$\text{Jumlah Paket} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah komponen})$ <p>n adalah jumlah paket yang dihitung</p>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah total paket atau unit peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dipasang atau disediakan di sebuah kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor melibatkan berbagai barang, termasuk meja, kursi, komputer, printer, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya yang mendukung kegiatan operasional kantor.	$\text{Jumlah Paket} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Item})$ <p>n adalah jumlah paket yang dihitung</p>	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah total paket atau unit barang-barang yang terkait dengan proses cetakan dan penggandaan yang telah dipasang atau disediakan. Ini dapat mencakup berbagai jenis barang seperti kertas, tinta, toner, printer, mesin fotokopi, dan peralatan cetak lainnya yang diperlukan dalam operasional	$\text{Jumlah Paket} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Barang})$ <p>n adalah jumlah paket yang dihitung</p>	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah total dokumen yang telah disediakan dan tersedia untuk bahan bacaan dan referensi terkait peraturan perundang-undangan di suatu lingkungan atau organisasi. Dokumen ini dapat mencakup undang-undang, peraturan, kebijakan internal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum dan regulasi.	$\text{Jumlah Dokumen} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Dokumen})$ <p>n adalah jumlah jenis dokumen yang dihitung</p>	

Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah total laporan yang dibuat atau disusun sebagai bagian dari proses fasilitasi kunjungan tamu di suatu tempat atau organisasi. Laporan-laporan ini mencakup informasi terkait dengan fasilitas, pelayanan, dan kegiatan selama kunjungan tamu.	$\text{Jumlah Laporan} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Laporan}_i)$ n adalah jumlah jenis laporan yang dihitung.	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah total laporan yang dibuat atau disusun sebagai hasil dari penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di suatu organisasi atau lembaga pemerintah. Laporan ini mencakup informasi terkait dengan hasil rapat, keputusan yang diambil, dan rencana tindak	$\text{Jumlah Laporan} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Laporan}_i)$ dimana n adalah jumlah jenis laporan yang dihitung.	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	Prosentase kebutuhan barang milik daerah telah terpenuhi melalui proses pengadaan. Persentase ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pengadaan barang yang dimiliki oleh suatu daerah atau pemerintahan.	$\left( \frac{\text{Jumlah lbarang yang sudah diperoleh}}{\text{Jumlah kebutuhan barang}} \right) \times 100 \%$	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin yang telah disediakan atau tersedia di suatu tempat atau organisasi. Peralatan dan mesin ini bisa mencakup berbagai jenis, seperti peralatan kantor, mesin produksi, alat teknis, dan sebagainya.	$\text{Jumlah Unit} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Peralatan/Mesin}_i)$ dimana n adalah jumlah jenis peralatan dan mesin yang dihitung.	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</b>	Mengukur sejauh mana kebutuhan akan jasa penunjang layanan perkantoran telah terpenuhi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jasa penunjang layanan perkantoran dapat mencakup kebersihan, keamanan, layanan catering, dan layanan-layanan lain yang mendukung fungsi operasional kantor.	$\left( \frac{\text{Jumlah jasa yang sudah diperoleh}}{\text{Jumlah kebutuhan jasa}} \right) \times 100 \%$	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang dibuat atau disusun sebagai hasil dari penyediaan jasa surat menyurat di suatu organisasi atau lembaga. Laporan-laporan ini mencakup informasi terkait dengan proses penyediaan jasa surat menyurat, kinerja layanan, dan evaluasi kualitas layanan tersebut.	$\text{Jumlah Laporan} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Laporan}_i)$ dimana n adalah jumlah jenis laporan yang dihitung.	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan yang dibuat atau disusun sebagai hasil dari penyediaan jasa surat menyurat di suatu organisasi atau lembaga. Laporan-laporan ini mencakup informasi terkait dengan proses penyediaan jasa surat menyurat, kinerja layanan, dan evaluasi kualitas layanan tersebut.	$\text{Jumlah Laporan} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Laporan}_i)$ dimana n adalah jumlah jenis laporan yang dihitung.	

Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Total laporan yang dibuat atau disusun sebagai hasil dari penyediaan jasa pelayanan umum kantor di suatu organisasi. Laporan-laporan ini mencakup informasi terkait dengan penyediaan layanan umum, kinerja layanan, dan evaluasi kualitas layanan tersebut.	$\text{Jumlah Laporan} = \sum_{i=1}^n (\text{Jumlah Laporan } i)$ dimana $n$ adalah jumlah jenis laporan yang dihitung.	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	Mengukur sejauh mana barang milik daerah, seperti aset kantor, kendaraan, atau peralatan lainnya, dapat dipertahankan dan dipelihara dalam kondisi yang baik. Indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan aset yang dimiliki oleh pemerintah atau organisasi.	$\left( \frac{\text{Jumlah barang yang dipelihara}}{\text{Jumlah barang milik daerah yang dimiliki}} \right) \times 100 \%$	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah total kendaraan dinas atau perorangan yang dipelihara dan untuk yang pajaknya telah dibayarkan. Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kendaraan dinas atau perorangan dipelihara dengan baik dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak.	$\left( \frac{\text{Jumlah kendaraan yang pajaknya sudah dibayarkan}}{\text{Jumlah kendaraan yang dipelihara}} \right) \times 100 \%$	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mengukur total kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan memiliki pajak serta perizinan yang sah. Indikator ini memberikan gambaran tentang keberhasilan dalam pemeliharaan, ketaatan terhadap kewajiban pajak, dan kepatuhan terhadap peraturan perizinan.	$\left( \frac{\text{Jumlah kendaraan yang pajaknya dan Perizinan sudah dibayarkan}}{\text{Jumlah kendaraan yang dipelihara}} \right) \times 100 \%$	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dalam suatu organisasi atau tempat. Indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas pemeliharaan peralatan dan mesin yang dimiliki	$\left( \frac{\text{Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara}}{\text{Jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki}} \right) \times 100 \%$	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara atau direhabilitasi dalam suatu organisasi atau gedung kantor. Indikator ini memberikan gambaran tentang upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur	$\left( \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara/ direhabilitasi}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki}} \right) \times 100 \%$	
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Kejadian Bencana yang tertangani</b>	Mengukur seberapa efektif penanganan dan respons terhadap kejadian bencana oleh suatu lembaga, organisasi, atau pemerintah. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dalam mengatasi dan merespons bencana serta keberhasilan dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan.	$\left( \frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana yang terjadi}} \right) \times 100 \%$	

Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase sejauh mana pelayanan informasi terkait rawan bencana telah disediakan oleh pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Indikator ini dapat mencakup informasi mengenai mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap potensi bencana.	$\left( \frac{\text{Jumlah Jenis Informasi Rawan Bencana yang Tersedia}}{\text{Jumlah informasi rawan bencana yang dibutuhkan}} \right) \times 100 \%$	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan informasi dan edukasi terkait jenis bencana, sejauh mana pelayanan informasi terkait rawan bencana telah disediakan oleh pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Indikator ini dapat mencakup informasi mengenai mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap potensi bencana.	$\left( \frac{\text{Jumlah Orang yang Mendapatkan KIE per Jenis Bencana}}{\text{Jumlah penduduk yang terpapar pada jenis bencana tertentu}} \right) \times 100 \%$	
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Mengukur sejauh mana kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana telah diimplementasikan dan berhasil di tingkat suatu organisasi atau wilayah. Indikator ini mencerminkan upaya untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan.	$\left( \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \right) \times 100 \%$	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana untuk kesiapsiagaan terhadap bencana di tingkat kabupaten/kota telah diimplementasikan dan dokumentasikan. Indikator ini mencerminkan upaya untuk mengelola dan memastikan kesiapsiagaan efektif terhadap bencana di suatu wilayah.	$\left( \frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah dibuat}}{\text{Jumlah dokumen yang seharusnya dibuat}} \right) \times 100 \%$	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiahaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan atau wilayah yang telah mengalami peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator ini mencerminkan upaya untuk memperkuat kemampuan komunitas atau kawasan tertentu dalam menghadapi potensi risiko bencana.	$\left( \frac{\text{Jumlah Kawasan yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Jumlah kawasan yang seharusnya ditingkatkan kapasitasnya}} \right) \times 100 \%$	
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Bencana yang di rehab dan di rekontruksi	Persentase kawasan yang terdampak bencana telah mengalami rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan fungsionalitas dan keberlanjutan setelah terjadinya bencana. Indikator ini mencerminkan kemajuan dalam upaya pemulihan pascabencana.	$\left( \frac{\text{Jumlah Kawasan yang yang Telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi}}{\text{Jumlah kawasan yang seharusnya ditingkatkan kapasitasnya}} \right) \times 100 \%$	

Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah personil (TRC) yang telah mengalami pengembangan kapasitas teknis dan manajerial. Indikator ini mencerminkan investasi dalam peningkatan kemampuan personil untuk memberikan layanan yang lebih baik.	$\left( \frac{\text{Jumlah Personil yang Telah Dikembangkan Kapasitasnya}}{\text{Jumlah Personil yang Harus Dikembangkan Kapasitasnya}} \right) \times 100 \%$	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah partisipasi dan kesiapsiagaan personel pemerintah (aparatur) dan warga negara dalam kegiatan gladi kesiapsiagaan atau latihan simulasi untuk menghadapi situasi darurat atau bencana. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat persiapan dan partisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan.	$\left( \frac{\text{Jumlah Aparatur dan Warga yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan}}{\text{Jumlah Aparatur dan Warga yang Seharunya Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan}} \right) \times 100 \%$	
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Prosentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Mengukur seberapa besar kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah berhasil diimplementasikan dalam suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan efektivitas upaya untuk menyelamatkan dan mengamankan korban dalam situasi darurat atau bencana.	$\left( \frac{\text{Jumlah Korban yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi}}{\text{Jumlah Personil yang Harus Dikembangkan Kapasitasnya}} \right) \times 100 \%$	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Prosentase efektivitas operasi penyelamatan dan evakuasi dalam menangani korban bencana. Indikator ini memberikan informasi tentang sejauh mana korban berhasil ditemukan, mendapatkan bantuan, dan dievakuasi berdasarkan jenis kejadian bencana tertentu.	$\left( \frac{\text{Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan/, Ditolong dan di Evakuasi}}{\text{Jumlah Korban yang terpapar bencana}} \right) \times 100 \%$	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase korban bencana telah mendapatkan distribusi logistik, termasuk bantuan penyelamatan dan evakuasi. Indikator ini mencerminkan efektivitas dalam menyediakan kebutuhan dasar dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana.	$\left( \frac{\text{Jumlah Korban yang yang mendapat distribusi log dan penyelamatan}}{\text{Jumlah Korban yang terpapar bencana}} \right) \times 100 \%$	
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase penataan sistem yang dilaksanakan</b>	Prosentase penataan sistem telah diimplementasikan dengan sukses. Indikator ini mencerminkan tingkat kemajuan dalam memperbaiki atau mengoptimalkan suatu sistem, baik itu dalam konteks pemerintahan, bisnis, atau organisasi lainnya.	$\left( \frac{\text{Jumlah Aspek Sistem yang Sudah Ditata}}{\text{Jumlah Aspek Sistem yang Ditata}} \right) \times 100 \%$	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah dokumen regulasi yang ada di tingkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen regulasi ini mencakup peraturan, kebijakan, panduan, atau instruksi yang bertujuan untuk mengatur dan mendukung upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut	$\left( \frac{\text{Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penanggulangan Bencana}}{\text{Total jumlah dokumen regulasi daerah}} \right) \times 100 \%$	

Nama Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah koordinasi yang terjadi dalam tata kelola kelembagaan bencana di tingkat daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat kerjasama dan keterlibatan berbagai lembaga atau instansi terkait dalam upaya penanggulangan bencana.	$\left( \frac{\text{Jumlah Pihak yang Terlibat}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi}} \right) \times 100 \%$	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi dan kerja sama antara lembaga serta kemitraan yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Indikator ini mencerminkan tingkat kolaborasi dan sinergi antar lembaga dan mitra dalam mengatasi bencana.	$\left( \frac{\text{Jumlah Kemitraan yang Terlibat}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama}} \right) \times 100 \%$	
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Jumlah Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP</b>	Jumlah kasus penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam penanggulangan kebakaran.	$\left( \frac{\text{Jumlah kasus penanggulangan kebakaran sesuai SOP}}{\text{Total jumlah kasus penanggulangan kebakaran}} \right) \times 100 \%$	
<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Mengukur prosentase seberapa besar kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, memadamkan, menyelamatkan, dan menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam konteks kebakaran di suatu daerah kabupaten/kota.	$\left( \frac{\text{Jumlah Kegiatan pada aspek tertentu}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan}} \right) \times 100 \%$	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran telah dilaksanakan dan direkam dalam laporan di suatu daerah kabupaten/kota.	$\left( \frac{\text{Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan}} \right) \times 100 \%$	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen yang dihasilkan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi, baik dalam konteks penanggulangan kebakaran maupun situasi non kebakaran.	$\left( \frac{\text{Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan}} \right) \times 100 \%$	

Pasuruan, 2024  
 Plt. KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KOTA PASURUAN

**ARY WIKIONO, SH**

Penata Tk. I/ III d

NIP. 196709011989101001